

"ANALISIS RESISTENSI
PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI STUDI (STUDI
KASUS PADA PASAR BERINGIN
KOTA GUNUNGSITOLI}"

by Tafonao Nofita

Submission date: 21-Nov-2023 07:02AM (UTC-0500)

Submission ID: 2235137231

File name: 194357.docx (993.67K)

Word count: 13641

Character count: 88492

**ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI STUDI**

(STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI}

SKRIPSI



Oleh :

NOFITA TAFONAO

NIM. 2319368

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NIAS**

LEMBAR PERSETUJUAN

Rancangan penelitian yang diajukan oleh :

Nama : NOFITA TAFONAO

NIM : 2319368

Program : Sarjana

Program Studi : S-1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Judu : ANALISI RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA
TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI

Telah diperiksa dan disetujui untuk diseminarkan.

Gunungsitoli, 21 Oktober 2023

Pembimbing Utama,

Plt. Ketua Program Studi Manajemen,

FATOLOSA HULU S.E.,M.M

NIDN. 0129059502

YUPITER MENDROFA, SE.,MM

NIDN. 0112078103

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyusun proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS RESISTENSIS PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUGSITOLI”**

Proposal skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Manajemen program Strata (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Nias.

Selama saya melakukan penyusunan proposal skripsi ini, Peneliti tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi Peneliti berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar- besarnya kepada :

1. Bapak Eliyunus Waruwu, S.Pt., M.Si selaku Pj. Rektor Universitas Nias.
2. Ibu Maria Magdalena Bate'e, SE., MM. selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nias.
3. Bapak Yupiter Mendrofa, SE., MM selaku Plt. Ketua Program Studi Manajemen Universitas Nias.
4. Bapak Fatolosa Hulu S.E., M.M selaku Dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu selaku dosen Penelaah yang sudah membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Manajemen yang telah memberikan ilmu bermanfaat kepada Peneliti.
7. Kepada kedua orang tua tercinta, abang, kakak, adek dan juga orang-orang terdekat yang telah memberikan dukungan dan juga tidak lupa memanjatkan doa demi kelancaran didalam perkuliahan dan terkhusus dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Kepada rekan seangkatan dan terkhusus buat teman-teman terdekat yang memberikan dukungan dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa yang tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan, Peneliti menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun tulisan. Oleh sebab itu Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan serta kesehatan yang baik dan semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Gunungsitoli, juli 2023

Peneliti,

NOFITA TAFONAO

NIM 2319368

DAFTAR ISI	
LEMBARAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Peneliti.....	3
1.6 Sistematika Penulisan	3
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Kajian Teori	5
2.3 Pengertian Resistensi	5
2.4 Jenis – Jenis Resisten.....	5
2.5 Tujuan Resistensi.....	6
2.5 Indikator Resistensi	7
2.6 Faktor – Faktor Resistensi	8
2.7 pengertian Pedagang kaki lima.....	9
2.7.1 Jenis Pedagang Kaki Lima	9
2.7.2 Bentuk Sarana Pedagang Kaki Lima	10
2.8 Kebijakan	12
2.8 Kerangka Berpikir	13
BAB III METODE PENELITIAN	14
3.1 Pendekatan Jenis penelitian	14
3.1.1 Jenis Data.....	14
3.1.2 Sumber data	14
3.2 Variabel Penelitian	15
3.3 Instrumen Penelitian	15
3.4 Teknik Pengumpulan Data	16

3.5 Teknik Analisis Data.....	10
3.6 Lokasi Dan jadwal Penelitian.....	17
3.7 Informan Penelitian	

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan Migrasi keperkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumber daya manusia ke dalam tenaga kerja.

Peluang kerja yang diharapkan di kota semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan – perusahaan baik disektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini

mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini.

Selama ini Pedagang kaki lima tersebut kurang dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota. Kehadiran pedagang kaki lima dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya menciptakan ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Pedagang kaki lima yang berjualan diatas trotoar dan sebagian badan jalan, yang menempati lokasi usah, seenaknya membuang sampah sembrangan tempat. Perilaku ini dimata pemerintah sangat mengganggu keberhasilan dan keteraturan kota Gunungsitoli.

Kegiatan pedagang Kaki lima tersebut tentunya akan membuat fasilitas tersebut umum yang terdapat pada suatu wilayah akan terganggu fungsinya. Hal ini membuat pemerintah kota akan mengeluarkan kebijakan relokasi yang ditetapkan memiliki tujuan agar fasilitas umum daerah serta penjualan yang ada diwilayah tersebut lebih tertata dan tidak memngganggu kegiatan masyarakat.

Trotoar – trotoar kota telah di tetapkan kebijakan sebagai kawasan yang tidak boleh digunakan untuk berjualan oleh PKL. Berbagai upaya

yang telah dilakukan pemerintah kota yaitu mulai dengan penertiban melakukan penertiban PKL Sehingga pasar. Hal ini dilakukan guna menjaga keamanan, ketertiban, keindahan, ketetraman serta kebersihan alun – alun kota sehingga pedagang digunakan fasilitas umum kota sebagai tempat berjualan, kecuali dilakukan pada wilayah yang telah ditetapkan dan diizinkan oleh pemerintah kota gunungsitoli.

Alasan yang mendasari pedagang yang berjualan di wilayah tersebut adalah karena ramainya pengunjung di pasar beringin setiap harinya. Jumlah pedagang yang berjualan di trotoar kota gunungsitoli semakin hari semakin banyaknya fungsi dari troar – trotoar maka mulai ada kegaduhan antara pedang dengan petugas dengan pemerintah mulai dilakukan kebijakan penertiban - penertiban oleh pemerintah dan munculnya aksi demonstrasi dari pedagang kaki lima. Kemudian peraturan kebijakan pemerintah kota gunungsitoli tentang penyelenggaraan ketetraman ketertiban umum. Karena mereka tidak diberikan lokasi yang strategis untuk mereka yang berjualan. Setelah peraturan disahkan oleh pemerintah kota gunungsitoli masih terus aksi – aksi kegaduhan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kota guntugsitoli.

Kebijakan pemerintah kota gungsitoli adalah Institusi /penaatan Kewewewngan mengatur, menata, pembina PKL Trotoar - trotoar berdasarkan pengaman yang dilakukan, resistensi pedagang kalilima kota Gunungsitoli sangat beragam. Resistensi yang dilakukan diantaranya seperti tetap berdagang di pasar trotoar hingga melakukan kegaduhan di pasar beringin yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli Pkl disekitar trotoar bahwa kebijakan pemerintah kota Gunungsitoli yang dibuat oleh pemerintah kota Gunungsitoli sangat merugikan pedagang. Sehingga banyak aksi – aksi protes yang bermunculan terhadap kebijakan pemerintah kota Gunungsitoli yang telah dibuat pedagang kakilima kota gunungsitoli juga membentuk paguyuban untuk menentang kebijakam pemerintah paguyuban ini dibentuk dengan tujuan untuk menyuarakan aspirasi pedagang.

Menurut (mentari dkk, 2018:328-337). Maraknya Pkl disuatu wilayah juga disebabkan sulitnya lapangan pekerjaan banyaknya PHK yang dilakukan

oleh perusahaan. Pedagang kaki lima juga dapat dikatakan sebagai pusat distribusi atau jasa yang tidak berizin dan tidak menetap atau berpindah.

Kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli Tindakan informal sudah ditetapkan telah dilaksanakan sampai saat ini, namun, dalam implementasi kebijakan pasar munculnya persepsi negatif bagi para pedagang kaki lima di trotoar pasar dan juga resistensi di wilayah tersebut.

Kebijakan menurut Hasibuan (2019:1) adalah proses yang dilakukan dalam pengambilan suatu keputusan atau alat dapat mencapai tujuan yang telah di tentukan. Sedangkan menurut B.R S parker dalam Mufidah (2020 :159 - 166) menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

Lumbantoran dkk (2021: 914-923) menyebutkan bahwa Resistensi dapat disebabkan oleh faktor organisasi, yaaitu karena adanya perbedaan persepsi atau pemikiran antara indiviu dan menyebabkan terjadinya upaya penolakan didalam suatu organisasi.

Berdasarkan observasi dilakukan masih saja ada pedagang yang tidak bersedia menempati tempat bangunan yang disediakan pemerintah. Bahkan ada yang tidak mau tau tentang larangan- larangan yang berjualan di area depan pasar. Setelah melakukan observasi terdapat pedagang yang masih berjualan tidak pada tempatnya.

tabel 1

Pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya

No	Pedagang	Lokasi
1	Sayur	Di depan pasar
2	Cabe / Bawang	Di depan pasar
3	Buah – Buahan	Di depan pasar
4	Tahu, Tempe dan Tauge	Di depan pasar
5	Ikan	Dibelakang pasar
6	Martabat Telur	Di depan pasar
7	Ubi	Di depan pasar

1 Operasi ketertiban umum tidak pernah membuat jera pelaku sektor informal untuk kembali menggelar denganya. Setiap kali ada razia, begitu petugas pergi, maka pedagang kaki lima datang dan melakukan aktivitas kembali seperti sediakala. Begitulah kegigihan pelaku sektor informal untuk mempertahankan mata pencaharia hidupnya itu. Hal ini mengakibatkan semakin banyak pedagang kaki lima yang bermunculan di kota – kota, salah satunya di kota gunungsitoli.

“Permasalahan PKL di pasar beringin Kota Gunungsitoli sebenarnya Pedagang Kaki Lima berkeinginan melakukan penjualan di atas trotoar. Terkait hal itu pemerintah Kota Gunungsitoli telah merelokasikan Tempat penjualan pedagang kedalam kios Pasar Beringin, tetapi hasil kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait relokasi tidak merasa puas, tidak setuju dan tidak adil bagi Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima menganggap Kebijakan – Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Merugikan Usaha dan Mata Pencaharian Mereka.

Berdasarkan Kebijakan Formal Relokasi pedagang Kota Gunungsitoli Sebagai relokasi pedagang Kaki Lima di Psara Beringin Koata Gunungsitoli ada beberapa kebijakan Formal terkait relokasi pedagang di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli yaitu Penetapan Lokasi Baru, Perizinan dan Izin Usaha, Bantuan Relokasi, Sosialisasi dan Konsultasi, Fasilitas dan Infrastruktur, Keamanan dan Ketertiban, Pemantauan dan Evaluasi.

1 Demikian pula pedagang kakilima di pasar beringin kota Gunungsitoli dalam menjalankan kegiatannya menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak berbagai masalah kota Gunumgsitoli Pasar Beringin Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan peneliti lebih lanjut dengan judul **ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

1.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Resisistensi pedagang kakilma terhadap kebijakan pemerintah kota gununsitoli

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diambil adalah :

1. Bagaimana bentuk- bentuk penolakan Pedagang kaki lima di pasar Beringin terhadap kebijakan pemerintah kota gungungsitoli?
2. Apa Faktor penyebab pedagang kaki lima menolak kebijakan Pemerintah?
3. Mengapa pedagang kaki lima melakukan Resistensi terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk – bentuk Penolakan pedagang kaki lima di Pasar Beringin Terhadap kebijakan Pemerintah
2. Untuk mengetahui faktor penyebab penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di pasar beringin
3. Untuk mengetahui pedagang kaki lima melakukan Resistensi terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yakni :

1. Bagi Universitas Nias:

Bagi dunia akademisi, skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu analisis Resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Gungungsitoli.

2. Bagi Instan/Pemerintah:

Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi instansi tentang analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli

- a. Bagi Akademik :

Bagi dunia akademisi, skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

- b. Bagi Instansi/Pemerintahan :

Melalui hasil penelitian ini secara praktis dan dapat dijadikan pedoman bagi Instansi tentang Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah.

c. Bagi peneliti :

Dapat meningkatkan pengetahuan peneliti khususnya Analisis resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan dapat memahami isi materi yang akan dibahas Peneliti mencoba membuat sistematika Penelitian yang akan disajikan yaitu dalam bab yang satu dengan bab yang lainnya agar saling terkait atau saling berhubungan. Sesuai dengan isi materi pokok pembahasan yang akan dibahas.

Adapun tindakan dari bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas tentang teori tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Studi Kasus Pada Pasar Beringin Kota Gunungsitoli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang metode penelitian dengan metode kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Metode Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini tidak dapat dimaksud untuk menguji hipotesis akan tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel gejala atau keadaan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Resistensi

Resistensi Dalam (¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005 :645) Resistensi terhadap suatu perubahan adalah rasional dan juga tindakan pengamanan untuk *survie*, meskipun seringkali resistensi juga menghambat kemajuan budaya manusia. Resistensi tidak selalu terlihat, karena Bentuk dari resistensi itu sendiri berbeda – beda. Ada hanya untuk sekedar tidak ikut, apatis, sampai pada perlawanan, tergantung dari kadar perubahan tersebut atau berusaha menjauhinya.

Menurut Uha, ismail N (2014 : 75). Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.

⁵ Menurut Matsumoto dalam Handoyo (2012:139) menyatakan bahwa “resistensi adalah suatu proses menentang, melawan, atau bertahan dari sesuatu atau orang lain”.

Resistensi pedagang kaki lima kemudian bukan di temukan ¹ dalam individu, tetapi dalam persepsi dibangun oleh individu. Partisipan yang mempunyai perbedaan persepsi yang dibangun akan mempunyai anggapan yang berbeda terhadap dirinya sendiri dengan dunianya. Persepsi yang ada di masyarakat dibentuk oleh pola pikir yang ada dalam pikiran manusia yang berisi ide dan gagasan dan memiliki batas – batas norma serta nilai – nilai tatanan dalam masyarakat itu sendiri. Hasilnya mereka menempuh tindakan yang berbeda dan menunjukkan bentuk resistensi yang berbeda, tergantung pada lingkungan dimana mereka hidup. Resistensi kemudian dipahami sebagai sebuah respon terhadap suatu inisiatif perubahan, suatu respon hasil rangsangan yang membentuk kenyataan dimana individu hidup.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa ⁹ resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah membantu memahami sifat resistensi dan menggambarkan bahwa resistensi

dapat menjadi reaksi yang wajar dari individu atau kelompok ketika mereka merasa terancam oleh perubahan atau kebijakan yang diberlakukan. Penting untuk diingat bahwa tingkat dan bentuk resistensi dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi spesifik dari perubahan atau ancaman yang dihadapi.

2.1.2 Jenis-Jenis Resistensi

Resistensi Pasif menurut (Tampubolon,2012) menyatakan bahwa Jenis resistensi ini ditandai dengan perilaku Pedagang kaki lima yang menolak kebijakan Pemerintah atau mempertahankan status quo tanpa menunjukkan perlawanan secara terbuka. Hal ini mungkin terlihat dalam ketidak aktifan, ketidak pedulian, atau penolakan diam terhadap Kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa resistensi ini mencirikan pedagang kaki lima yang tidak secara terbuka menentang atau melawan kebijak pemerintah, tetapi mereka menunjukkan penolakan atau ketidak setujuan secara tidak langsung melalui perilaku seperti: ketidak suka terhadap kebijakan: menyatakan bahwa ketidak sukaan terhadap perubahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah. Manusia cenderung memiliki zona nyaman, dan ketika ada kebijakan pemerintah yang merubah kondisi atau rutinitas yang biasa, beberapa individu atau kelompok mungkin merasa tidak nyaman atau khawatir dengan kebijakan tersebut.

kejutan dan ketakutan yang tidak di ketahui : Ketidak pastian atas perubahan atau akibat dari kebijakan yang tidak diketahui dapat menyebabkan ketakutan dan kekhawatiran yang dapat memicu resistensi. Ketika individu atau kelompok merasa bahwa hasil perubahan tidak dapat diprediksi atau tidak diketahui sepenuhnya, mereka mungkin lebih cenderung menolak kebijakan tersebut. muncul tidak rasa percaya: individu atau masyarakat merasa bahwa tujuan atau alasan di balik kebijakan tidak transparan atau tidak dapat dipercaya, maka rasa tidak percaya ini dapat menjadi pemicu resistensi. Kepercayaan adalah elemen penting dalam membangun dukungan terhadap perubahan. rasa takut akan kegagalan : Rasa takut akan kegagalan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi resistensi. Jika pedagang merasa bahwa kebijakan berpotensi menyebabkan kegagalan atau kerugian bagi mereka, mereka mungkin enggan atau menentang perubahan tersebut. merasa tidak

nyaman tidak mendapat kepastian: Ketidak pastian dan ketidak jelasan seputar perubahan dapat menyebabkan rasa tidak nyaman bagi pemerintah atau masyarakat. Kekhawatiran akan hilangnya kepastian atau stabilitas dapat menyebabkan resistensi terhadap kebijakan pemerintah.

2.1.3 Tujuan Resistensi Pedagang Kaki Lima

Menurut McGee dan Yeung , (2014:9) bahwa tujuan resistensi pedagang kaki lima ada beberapa yaitu: Melindungi mata pencaharian dan eksistensi usaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk melindungi mata pencaharian mereka dan eksistensi usaha mereka dari perubahan atau kebijakan yang dapat mengancam usaha mereka.

Mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk mempertahankan hak-hak dan kebebasan berusaha mereka yang dianggap terancam oleh kebijakan atau peraturan baru.

Menentang ketidakadilan dan diskriminasi: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil atau diskriminatif terhadap sektor informal.

Menuntut keterlibatan dalam pengambilan keputusan: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk mendapatkan keterlibatan dan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada usaha mereka. Memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum: Pedagang kaki lima mungkin melakukan resistensi untuk memperjuangkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam ekonomi dan perlindungan hukum yang memadai.

2.2.4 Indikator Resistensi Pedagang Kaki Lima

1. Menurut (Ford & Ford, 2009: 26009) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat. Dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak,

pengambilan keputusan dapat menjadi lebih holistik dan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

2. Menurut (Oreg, Vakola, dan Armenakis, 2011 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedagang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka. Ketika pedagang kaki lima merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kaki lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Menurut Dawson, P. (2003) menyatakan bahwa indikator resistensi adalahh “Perlawanan Terbuka atau Kritik Terhadap Perubahan: Individu atau

kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidak setujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidak setujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang berlangsung dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Dari beberapa menurut para ahli diatas peneliti menekankan pentingnya memahami persepsi dan pandangan pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat menjadi isyarat penting bagi pemerintah untuk memahami kebutuhan dan aspirasi dari kelompok usaha tersebut. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan konsekuensi dari tindakan formal yang diambil dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

2.2.5 Faktor – Faktor Resistensi Pedagang Kaki Lima

Menurut para ahli Cynthia S. Arbaugh dan Gary W. Selnow (2005)ada beberapa faktor – faktor Resistensi pedagang kaki lima yitu:

1. Peraturan dan Hukum: Regulasi yang ketat atau peraturan yang tidak jelas dapat menjadi hambatan bagi pedagang kaki lima dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini terutama berlaku jika ada larangan atau batasan pada lokasi penjualan atau kegiatan mereka.
2. Penegakan Hukum: Jika penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima berlebihan atau sewenang-wenang, hal ini bisa menjadi faktor resistensi karena dapat menyulitkan mereka untuk beroperasi dan mempengaruhi keberlanjutan usaha mereka.
3. Persaingan dan Urbanisasi: Perkembangan kota dan persaingan bisnis dapat menyebabkan perubahan dalam pola konsumsi, mempengaruhi pendapatan, dan memperumit akses ke lokasi penjualan yang menguntungkan.
4. Akses ke Sumber Daya: Keterbatasan akses ke modal, bahan baku, atau infrastruktur yang diperlukan untuk usaha pedagang kaki lima dapat menyulitkan mereka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mereka.

5. Stigma Sosial: Beberapa masyarakat mungkin memiliki pandangan negatif terhadap pedagang kaki lima, yang dapat menyebabkan stigma sosial dan mengurangi dukungan dari masyarakat atau pemerintah.
6. Ketidakpastian Ekonomi: Fluktuasi ekonomi atau krisis dapat mengurangi daya beli masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima.
7. Ketersediaan Ruang Publik: Masalah mengenai akses dan izin untuk menggunakan ruang publik sebagai tempat berjualan juga dapat menjadi faktor resistensi bagi pedagang kaki lima.
8. Teknologi dan Perubahan Perilaku Konsumen: Perubahan tren teknologi dan perilaku konsumen juga dapat berdampak pada cara pedagang kaki lima beroperasi dan berinteraksi dengan pelanggan.

Dalam menghadapi faktor-faktor resistensi ini, pedagang kaki lima harus mengembangkan strategi adaptasi dan inovasi untuk tetap bertahan dan berkembang dalam lingkungan yang berubah. Selain itu, upaya pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan usaha pedagang kaki lima.

2.3 Pengertian Pedagang Kaki Lima

Menurut Nugroho (2003:59) pedagang kaklima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial diatas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan untuk berjalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Menurut Damsar (2002:51) Pedagang kaki lima (Sektor informal adalah mereka yang melakukan kegiatan usaha dagangan perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat – tempat fasilitas umum, seperti terotoar, pinggir- pinggir jalan umum, dan lain – lain sebagainya.

Menurut (Sinambela, 2008:14) Pedagang kaki lima adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor iformal. Pedagang kaki lima adalah orang - orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang – barang (jasa – jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu dalam masyarakat,

usaha tersebut pada tempat – tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal

Pedagang kaki lima adalah sebagai yaitu orang – orang yang menawarkan barang – barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalur pejalan kaki di pinggir jalan ruang tersebut digunakan untuk kegiatan berjualan pedagang kecil sehingga disebut pedagang kaki lima. Dari beberpa menurut para ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa PKL adalah kelompok pedagang yang beroperasi di lingkungan informal dan sering menggunakan tempat-tempat fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Meskipun mereka bekerja dalam sektor informal dan menggunakan modal yang terbatas, PKL memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dan memberikan kontribusi dalam sektor perdagangan di lingkungan perkotaan. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami peran dan tantangan yang dihadapi oleh PKL serta memberikan dukungan dan regulasi yang tepat untuk memfasilitasi kelangsungan usaha mereka.

2.3.4 Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

(PKL) Selain itu Karafir (1997) juga mengemukakan ciri-ciri pedagang kaki lima (PKL) yang antara lain adalah barang-barang jasa yang diperdagangkan sangat terbatas pada jenis tertentu, berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan diatas, Karafir (1997) menggolongkan PKL menjadi 10 kelompok, yaitu: Pedagang sayur, Pedagang cabe, Pedagang ikan, Pedagang Ubi.

larangan berjualan dan penempatan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang didalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan dan atau mempergunakan tempat usaha yang menempati tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau pihak lain. Kebanyakan Pedagang Kaki Lima (PKL) memilih berjualan di tempat keramaian, seperti pasar, trotoar, dijalan pinggir jalan umum, atau halte-halte dan tempat keramaian orang. Bentuk sarana perdagangan yang dipergunakan oleh para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya sangat bervariasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc. Gree dan Yeung (dalam

Novita, 2014) di kota Gunungsitoli diketahui bahwa pada umumnya bentuk sarana tersebut sangat sederhana dan biasanya mudah untuk dipindah atau dibawa dari satu tempat ke tempat lain dan dipengaruhi oleh jenis dagangan yang dijual. Adapun bentuk sarana perdagangan yang digunakan oleh pedagang kaki lima. Menurut Novita (2014), adalah sebagai berikut :

1. Gerobak/kereta dorong Bentuk sarana ini terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu gerobak/kereta dorong tanpa atap dan gerobak/kereta dorong yang beratap untuk melindungi barang dagangan dari pengaruh cuaca. Bentuk ini dapat dikategorikan dalam bentuk aktivitas pedagang kaki lima yang permanen (static) atau semi permanen (semi static), dan umumnya dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan makanan, minuman dan rokok.
2. Warung semi permanen Terdiri dari beberapa gerobak/kereta dorong yang diatur sedemikian rupa secara berderet dan dilengkapi dengan kursi dan meja. Bagian atap dan sekelilingnya biasanya ditutup dengan pelindung yang terbuat dari kain plastik, terpal atau lainnya yang tidak tembus air. Berdasarkan sarana usaha tersebut, pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan pedagang permanen (static) yang umumnya untuk jenis dagangan makanan dan minuman.
3. Kios Bentuk sarana pedagang kaki lima ini menggunakan papan-papan yang diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai sebuah bilik semi permanen, yang mana pedagang yang bersangkutan juga tinggal ditempat tersebut. Pedagang kaki lima ini dapat dikategorikan sebagai pedagang menetap (static).
4. Jongko/meja Sarana berdagang yang menggunakan meja jongko dan beratap, sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima yang menetap.
5. Gelaran/alas Pedagang kaki lima menggunakan alas berupa tikar, kain atau lainnya untuk menjajakan dagangannya. Berdasarkan sarana tersebut, pedagang ini dapat dikategorikan dalam aktivitas semi permanen (semi static).

Umumnya dapat dijumpai pada pedagang kaki lima yang berjualan barang - barang dan makanan. Setiap Pedagang Kaki Lima mempunyai hak :

1. Mendapatkan pelayanan perizinan.

2. Penyediaan lahan lokasi Pedagang Kaki Lima.
3. Mendapatkan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil
4. menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi
5. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat
6. Pedagang buah-buaha.
7. Pedagang Tahu, Tempe dan Tauge

2.3.5 Bentuk Sarana Pedagang Kaki Lima

PKL Menurut Peraturan Daerah Kota Kota Gunugsitoli Nomor 8 Tahun 2000 tentang Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksana suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya.

Menurut Anderson (2003:2), kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Menurut Weible dan Sabatier (2017: 4), kebijakan adalah "rangkaian tindakan dan keputusan formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarahkan perilaku dan hasil kebijakan tertentu."

Menurut Dunn (2014: 21), kebijakan merupakan "suatu tindakan yang diambil atau dipilih oleh penguasa (atau oleh kelompok penguasa) dari suatu alternatif, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu, berdasarkan atas suatu nilai atau keyakinan tertentu."

Dari beberpa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau pernyataan formal dan informal yang diambil oleh pemerintah, kelompok, atau individu untuk mengarahkan perilaku dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu. Kebijakan bisa bersifat formal, seperti

peraturan, undang-undang, atau keputusan pemerintah, maupun informal, seperti panduan, arahan, atau pernyataan dari kelompok atau individu.

2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah Rangkaian konsep dan asas menjadi garis besar dan dasar rencana dipelaksana suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak pemerintah, organisasi dan sebagainya.

Menurut Anderson (2003: 2), kebijakan dapat didefinisikan sebagai "suatu pernyataan mengenai apa yang harus dilakukan atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, dilakukan oleh pemerintah, kelompok, atau individu."

Menurut Weible dan Sabatier (2017: 4), kebijakan adalah "rangkaiian tindakan dan keputusan formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarahkan perilaku dan hasil kebijakan tertentu."

Menurut Dunn (2014: 21), kebijakan merupakan "suatu tindakan yang diambil atau dipilih oleh penguasa (atau oleh kelompok penguasa) dari suatu alternatif, yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu, berdasarkan atas suatu nilai atau keyakinan tertentu."

Dari beberpa menurut para ahli diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan, keputusan, atau pernyataan formal dan informal yang diambil oleh pemerintah, kelompok, atau individu untuk mengarahkan perilaku dan mencapai tujuan atau sasaran tertentu dalam suatu situasi atau masalah tertentu. Kebijakan bisa bersifat formal, seperti peraturan, undang-undang, atau keputusan pemerintah, maupun informal, seperti panduan, arahan, atau pernyataan dari kelompok atau individu.

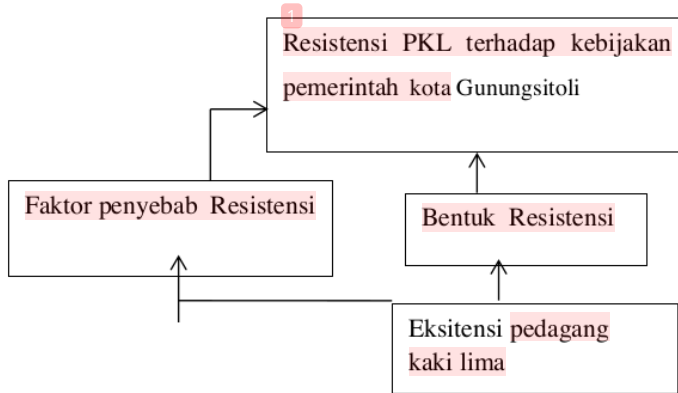
2.4 Kerangka Berpikir

Kerangka pikiran merupakan kerakang konseptual yang memamparkan dimensi – dimensi utama dari penelitian, faktor – faktor kunci, Variabel – variabel yang berhubungan antara dimensi yang disusun dalam bentuk narasi grafis, sebagai pedoman kerja, baik dalam

menyusun metode pelaksanaan di lapangan maupun pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual Resistensi pedagang kaki lima Terhadap kebijakan pemerintah kota gunugsitoli.

Gambar. 2.1

Sumber : Penulis, 2023



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus kualitatif. Metode studi kasus menghendaki suatu kajian yang rinci, mendalam, menyeluruh atas objek tertentu yang biasanya relatif kecil selama kurun waktu tertentu termasuk lingkungannya (Umar, 2010:8- 9). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti misalnya perilaku Pedagang, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 200:3) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada individu secara holistik (utuh atau menyeluruh).

penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus menfokuskan dirinya untuk mengetahui secara umum kasus dari objek studi yang akan menjadi sasaran penelitiannya. Melalui metode kualitatif, peneliti untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menyelidiki latar belakang bentuk – bentuk resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli.

3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Sudirman Pasar Beringin Kota Gunugitoli

Sebagai relokasi penelitian ini karena merupakan instansi yang berwnang mengelola dan menata pedagang. Kesiapan Formal terkait Relokasi pedagang Kota Gunungsitoli yaitu:

3.2.2 Jadwal penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu enam bulan, mulai bulan Otobert 2023 sampai maret 2024

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																	
		Oktober			November			Desember			Januari			Fembuari		Maret			
1	Pengajuan Judul	█	█	█															
2	Bimbingan Proposal				█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				
3	Seminar Proposal															█			
4	Penelitian																█	█	█
5	Pengolahan Data																	█	█
6	Ujian Skripsi																		█

14

3.4 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang benar – benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang kemudian dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa keterangan pertanyaan atau data – data yang dapat membantu dalam memahami persoalan tersebut. Dalam penelitian ini, penelitan memilih informan penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dapat memberikan informasi atau data yang di butuhkan dalam penelitian ini. Adapun yang dipilih menjadi informan dalam penelitian ini (lima)orang 5 adalah sebagai berikut:

1. Ibu Putra Lase
2. Ibu wati telau mbanua
3. Ibu Lina Laia
4. Ibu Heni Gea
5. Ibu fito mendrofa

3.4 . Variabel Penelitian

Operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2019:68). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah variabel tunggal. Menurut sugiyono (2016 :38) mengatakan bahwa variabel tunggal adalah sebagai suatu atribut, sifat atau nilai dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti kemudian diambil kesimpulannya. Yang menjadi variabel tunggal dalam ini adalah resistensi pedagang kaki lima. Menurut Uha, ismail N (2014 : 75). Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.

Variabel	Indikator
Kebijakan pemerintah Menurut (Weible dan Sabatier 2017: 4) kebijakan adalah "rangkaian tindakan dan keputusan formal dan informal yang dilakukan oleh pemerintah yang mengarahkan perilaku dan hasil kebijakan tertentu."	Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal.

<p>Resistensi pedagang kaki lima Menurut Menurut (Uha, ismail N (2014 : 75) Resistensi ini muncul karena masyarakat pedagang kaki lima tidak berprestasi mengubah sistem dominasi, tetapi hanya untuk menolak sistem yang berlaku bersifat eksploitatif dan tidak adil.</p>	<p>Penolakan terhadap Kebijakan Pemerintah: Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka.</p>
---	--

3.5 Sumber Data

Untuk memperoleh sumber data dengan masalah yang akan diteliti maka penulis menggunakan dua sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang akan peneliti temukan yaitu melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terkait.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen - dokumen, resmi, buku - buku yang sesuai dengan objek peneliti, sikripsi, tesis dan peraturan perundanga – undangan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli

3.6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur fenomena alam atau sosial (sanusi, 2014 : 67). Penelitian ini menggunakan instrument penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti : Peneliti merupakan elemn terpenting didalam penelitian kualitatif karena peneliti harus terjun langsung kelapangan. Peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data analisis, penafsir

data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. (moleong, 2011 : 168)

2. Panduan wawancara : Wawancara yang akan dilakukan harus menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara. Pertanyaan yang ditanyakan kepada pedagang kaki lima Di kota gunungsitoli mengikuti yang telah di buat sebelumnya. Pewawancara perlu menyampaikan dengan jelas - jasanya dan sederhana mungkin dan tidak menyimpan dari panduan wawancara (Nazir, 2011 : 194 dan 196)

3. Studi dokumentasi

Sebuah penelitian kualitatif memerlukan dokumentasi untuk dianalisis. Dokumentasi yang dianalisis bisa bersal dari diri sendiri atau orang lain. Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek (Herdinsyah, 2011 : 143)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis di gunakan dalam penelitian Ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi : Observasi adalah metode pengumpulan data dengan terjun langsung kelapangan. Penelitan akan melihat langsung sebgaimana situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan, dan mengumpulkan data dengan mengamati dan mencatat kejadian – kejadian yang terjadi dilapangan secara sistemati. Penelitan juga melihat bagaimana berjalannya proses resistensi perubahan organisasi terhadap kinerja pegawai apakah berjalan dengan lancar atau tidak.
2. Wawancara : Wawancara adalah proses memeperoleh informasi dengan bertata muka dan Tanya jawab dengan responden. Penelitian akan menanyakan langsung beberapa pertanyaan yang ada kaitanya dengan permasalahan dalam penelitian ini kepada pedagang kaki lima di Kota Gungsitoli.
3. Dokumentasi : merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya penting dari seseorang. Studi

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, kegiatan organisasi, tata tertib organisasi, dan fungsi organisasi tersebut serta foto dokumentasi kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara

3.8 Teknik Analisa Data

Analisis data menurut sugiyono (2018:482) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi,dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknis analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dimulai sebelum peneliti mengajukan usulan penelitian dengan melakukan pengamatan dan wawancara awal atau terlibat langsung. Dari data-data sementara tersebut, penulis telah mengemukakan beberapa fenomena sementara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, pengumpulan data utama akan dilakukan pada saat penelitian di lapangan melalui pengamatan terlibat, wawancara mendalam, dan kajian dokumentasi.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan tema.

3. Penyajian data

Semua data yang telah di kumpulkan dan dapat di olah oleh peneliti di lapangan akan sulit dalam melihat gambaran dan menarik kesimpulannya, penyajian data untuk mempermudah pemahaman gambaran data, peneliti

melakukan penyajian data dalam bentuk narasi dari data-data yang telah di peroleh sebelumnya.

4. Penarikan kesimpulan

Dari langkah-langkah yang di lakukan oleh peneliti di mulai dengan pengumpulan data di lapangan,dengan memilih hal yang pokok dan memfokuskan gambaran mengenai data-data yang di dapat,maka tahap akhir teknis data penelitian ini yaitu mengambil kesimpulan dari semua data yang di peroleh oleh peneliti.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dapat terlaksana dengan adanya orang – orang yang berada pada Lokasi Penelitian sebagai responden yang memberikan data dan informasi tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Deskriptif penelitian ini bermanfaat untuk memamparkan semua data dan informasi yang telah di peroleh dari lokasi penelitian. Pada Bab ini peneliti memamparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil dari penelitian akan di jabarkan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, wawancara terhadap informan yang di butuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini, akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Oktober sampai November 2023 yang dilakukan di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli.

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Umar, 2010 : 8 – 9 penelitian kualitatif adalah penelitian yang termasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek peneliti misalnya perilaku Pedagang, motivasi, tindakan, dan lain – lain. Sedangkan berupa pendekatan deskriptif.

Menurut Bodgan dan taylor dalam Moleong, 2000:3 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada indivdu secara holistik (utuh atau menyeluruh).

Untuk tahap Analisis yang di lakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan

melakukan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk dapat mengetahui Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Pendukung peneliti mewawancarai Pedagang Kaki Lima di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara bertahap dalam rentang pada bulan 2023 – November 2023.

Hasi penelitian ini diperoleh dengan teknik wawancara yang mendalam dengan nara sumber sebagai bentuk pencarian data dan observasi Non partisipan di lapangan yang kemudian peneliti Analisis, berikut merupakan tabel jadwal wawancara yang dilakukan oleh peneliti:

Gambar 4.1

Jadwal Wawancara

Nama Informan	Tanggal Wawancara	Tempat Wawancara
I.Putra Lase	1 November	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
Wati Telaumbanua	1 November	Pasar Beringin Kota Gungsitoli
Heni Gea	1 November	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
Lina Laia	1 November	Pasar Beringin Kota Gungsitoli
I.Fito Tafonao	1 November	Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

Sumber : Penelitian 2023

Selanjutnya, peneliti melakukan Analisis dengan menggunakan Tahapan – tahapan dalam melakukan observasi, dimana tahap observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : Analisis ini sendiri terfokus pada Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli di pasar beringin, dan di kaitkan dengan berupa unsur Rumusan masalah, tahap Analisis yang di gunakan adalah teknik pengumpulan data, dimana terdapat dua teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan dan studi pustaka.

Agar Peneliti ini lebih Objektif, data – data yang di dapat lebih akurat, peneliti mencari informan tambahan dengan cara melakukan wawancara mendalam, wawancara tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi secara akurat dari sumber data terpercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara dengan informan pendukung yang masih berkaitan dengan fokus penelitian ini untuk memperoleh data tambahan mengenai Analisis ini sendiri terfokus pada Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Untuk itu, agar wawancara ini lebih sistematis dan terarah, maka peneliti membagi kedalam tiga pembahasan yaitu:

1. Hasil Penelitian
2. Deskriptif Identitas
 - a. Identitas Informan Kunci
 - b. Identitas Informan Pendukung
3. Pembahasan
 - a. Mendatangi Pasar Beringin Kota Gunungsitoli
Utuk mendapatkan data yang di perlukan
 - b. Mencaritou Bagaimana Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli

Selanjutnya, peneliti melakukan Analisis data dengan cara seperti di bawah ini:

1. Pengumpulan data:
Pengumpulan data merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan. Dilakukan dengan teknik dokumentasi atau penelitian kepustakaan untuk memperoleh baik data primer maupun skunder. Kemudian peneliti melakukan pengamatan dan mencari informasi di tempat penelitian yakni di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli.
2. Reduksi Data Merupakan Penyederhanan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan kabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti mengmpulkan Informasi – informasi yang penting yang terkait dengan Analisis Resistensi

Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang sering di gunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian- penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah di pahami. Bentuk penyajian data ini dapat memudahkan peneliti memahami dan mengetahui Analisis Resistensi Pedagang Kaki lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli di Pasar Beringin.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam teknik Analisis Data yang dilakukan dengan melihat hasil reduksi data tetap mengaju pada rumusan masalah secara tujuan dari peneliti. Data yang telah disusun dibandingkan antara satu dengan yang lain untuk di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan. Merupakan tahap verifikasi berdasarkan hasil reduksi, interpretasi dan penyajian data, dari tahap tersebut akan di peroleh kesimpulan dalam menjawab hasil dari Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pertama Pengumpulan Data (Data Collection):

Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan masalah penelitian. hasil observasi dan wawancara mendalam yang didapatkan kemudian disusun berdasarkan rumusan masalah yang sudah

ditetapkan. sehingga setiap informasi yang didapatkan akan disesuaikan dengan apa yang diinginkan dalam rumusan masalah tersebut.

2. Tahap Kedua Reduksi Data (Data reduction):

Kategorisasi dan reduksi data, yaitu melakukan pengumpulan terhadap informasi penting yang terkait dengan masalah penelitian, selanjutnya data dikelompokkan sesuai topik masalah. Hasil observasi dan wawancara secara mendalam yang didapatkan, dikelompokkan sesuai dengan siapa yang menyampaikan informasi tersebut, dalam hal ini adalah Pedagang Kaki Lima

3. Tahap tiga Penyajian Data (Data Display):

Melakukan interpretasi data yaitu menginterpretasikan apa yang telah diinterpretasikan informan terhadap masalah yang diteliti. setelah data dikumpulkan maka data tersebut disesuaikan dengan informan yang mengatakan serta rumusan masalah yang sudah disusun. data yang sudah tersusun tersebut kemudian ditampilkan secara rapi agar mudah dipahami.

4. Tahap keempat Penarikan Kesimpulan (Conclusion verification)

Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian. setelah semuanya disusun maka melakukan pembahasan yang akan menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Data yang peneliti kumpulkan selanjutnya diuji untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan yang peneliti dapatkan di lapangan, peneliti menggunakan uji keabsahan data dengan cara:

1. Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda. selain wawancara, peneliti melakukan observasi untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan, hasil observasi kemudian di dokumentasikan. observasi yang dilakukan di Pasara Beringin.
2. Diskusi dengan teman sejawat, teknik ini dilakukan dengan mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan Pedagang Kaki Lima

3. Member check, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data, tujuan dari member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. sehingga informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan. Teknik member check ini dilakukan peneliti dimana setelah peneliti melakukan wawancara dengan ke Lima informan yang peneliti ambil, kemudian hasil dari wawancara tersebut peneliti melakukan transkrip di lembar yang sudah peneliti buat yaitu draft wawancara (instrumen penelitian) lalu hasil tersebut diperlihatkan oleh peneliti kepada para informan tersebut, akan terlihat apakah draft wawancara serta laporan penelitian (hasil interview) tersebut sesuai dengan pemaparan yang dikeluarkan oleh para informan atau tidak, dan setelah para informan mengatakan sesuai lalu peneliti mengajukan tanda tangan pada form biodata informan untuk melakukan kesepakatan bahwa beliau sudah menjadi informan pada penelitian yang peneliti lakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli. Maka peneliti telah memperoleh data-data yang berhubungan dengan topik pembahasan pada penelitian ini, yaitu sebagai Berikut :

4.2 Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima

4.2.1 Profil Singkat Pedagang Kaki Lima

Pasar Beringin di Gunungsitoli, 1975. Pada tahun 1975, kota ini dan pulau Nias mengalami ledakan wisatawan yang berumur pendek yang diikuti dengan perbaikan infrastruktur dalam waktu singkat. Pasar Beringin di Kota Gunungsitoli kemungkinan adalah salah satu pasar tradisional yang memiliki peran serupa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat. Pasar-pasar semacam itu juga mencerminkan keberagaman budaya dan produk lokal yang dapat ditemui di daerah tersebut.

1. Pengusaha Kecil: Banyak pedagang kaki lima adalah pengusaha kecil yang menjalankan bisnis mereka sendiri atau bersama dengan anggota keluarga.

Mereka sering menjual barang-barang dengan modal terbatas, seperti makanan, minuman, pakaian, dan barang-barang rumah tangga. Mereka berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, termasuk:

2. Penduduk Lokal: Sebagian besar pedagang kaki lima adalah penduduk lokal daerah sekitar Pasar Beringin. Mereka mungkin telah menjalankan usaha dagang mereka di pasar tersebut selama bertahun-tahun, mewarisi bisnis keluarga, atau memulai usaha mereka sendiri untuk mencari penghidupan.
3. Pekerja Harian: Beberapa pedagang kaki lima juga merupakan pekerja harian yang mencari penghasilan tambahan dengan menjual barang-barang di pasar saat mereka tidak bekerja di pekerjaan utama mereka.
4. Petani: Petani dari daerah sekitar Pasar Beringin mungkin juga menjadi pedagang kaki lima dengan menjual hasil pertanian mereka, seperti buah-buahan, sayuran, atau hasil ternak di pasar tersebut.
5. Migran: Beberapa pedagang kaki lima mungkin berasal dari daerah lain atau bahkan negara lain dan telah bermigrasi ke Pasar Beringin untuk mencari peluang ekonomi. Migran sering kali membuka usaha kecil di pasar-pasar tradisional.
6. Pekerja Informal: Pedagang kaki lima sering termasuk dalam kategori pekerja informal, yang berarti mereka tidak memiliki pekerjaan formal dan seringkali tidak memiliki perlindungan sosial atau keamanan pekerjaan.

Gunungsitoli adalah salah satu dari dua lokasi di Nias tempat pemerintah Belanda menahan tahanan Jerman selama .Para tahanan tersebut adalah bagian dari kelompok tahanan Jerman yang sebelumnya lebih besar di luar negeri, yang ditenggelamkan oleh pesawat pembom Jepang di lepas pantai barat Sumatera. Setelah mendengar berita tentang serangan Jepang di Sumatra, para tahanan Jerman merencanakan kudeta terhadap otoritas kolonial Belanda di kota tersebut. Para tahanan mencoba membujuk polisi setempat, yang dikenal sebagai Veldpolitie , untuk memberontak. Pada saat itu, kota ini adalah rumah bagi sekitar 60 tahanan Jerman. Pada tanggal 29 Maret 1942, polisi pribumi memberontak dengan menembak warga Belanda dan memenjarakan pejabat Belanda, dan kota tersebut segera diduduki. Setelah para tahanan Jerman menduduki, mereka

memendirikan negara Republik Merdeka Nias yang tidak dikenal Pada tanggal 17 April 1942, militer Jepang mendarat di kota tersebut dan disambut oleh para tahanan Jerman yang mengambil alih kota tersebut. Pada tanggal 24 April 1942, semua tahanan Jerman telah meninggalkan pulau itu dan pemerintahan diserahkan kepada Jepang hingga akhir Perang Dunia II.

Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00° 12' - 10° 32' Lintang Utara (LU) dan 97° 00' - 98° 00' Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0 - 600 meter diatas permukaan laut. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga (daerah Provinsi Sumatera Utara). Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 yang terdiri atas 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi. Kota Gunungsitoli memiliki luas 469,36 km² sesuai dengan data Badan Pusat Statistik Tahun 2010 (0,38 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara). Dari 6 (enam) Kecamatan yang terdapat di wilayah Kota Gunungsitoli tersebut terdapat 98 (sembilan puluh delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan, serta sebanyak 27 desa/kelurahan (27 %) terletak di daerah pantai, dan 74 desa/kelurahan (73 %) berada di daerah bukan pantai/pegunungan.

Selama Revolusi Nasional Indonesia , Gunungsitoli dan Nias berada di bawah blokade Angkatan Laut Belanda untuk memisahkan pulau tersebut dari pantai barat Sumatera. Akibat blokade tersebut, kota tersebut mencetak uang kertasnya sendiri karena uang kertas Partai Republik dari Bukittinggi tidak dapat diangkut. Uang kertas tersebut dikenal dengan nama ORIPDA-Nias (Uang Daerah Republik Indonesia-Nias). Militer Belanda mendarat di kota ini pada bulan November 1945. Hubungan antara pasukan yang baru tiba dan penduduk kota menjadi tegang, terutama karena

patroli terus-menerus oleh pemuda Republik bersenjatakan bambu runcing .Bentrokan bersenjata kecil terjadi di sekitar kota ketika militer Belanda mencoba mengambil kembali kendali gedung-gedung pemerintah yang diambil alih oleh kaum nasionalis Indonesia setelah perang berakhir.

Pemerintah republik Nias dievakuasi dari Gunungsitoli setelah kejadian tersebut. Pada bulan November 1946, Komite *Nasional Indonesia* (KNI) yang dipimpin oleh Roos Telaumbanua berusaha membentuk unsur-unsur bersenjata Partai Republik seperti cabang Badan Keamanan Rakyat dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di sekitar pulau. Panitia juga membentuk *Fonds Kemerdekaan* (Dana Kemerdekaan) untuk memberikan dukungan ekonomi kepada republik Indonesia di Tapanuli, daratan Sumatera, dan *Kongsi Pelajaran* (Persatuan Pelayaran). Dukungan ekonomi berupa penjualan kopra ke Singapura dan sumbangan daging babi serta minyak ke Tapanuli. Gunungsitoli adalah salah satu pusat utama dukungan Partai Republik di pulau tersebut. Akibat Operasi Kraai, komunikasi antara Nias dan Tapanuli terputus sehingga pulau tersebut mencoba menjalin komunikasi dengan Kutaraja ,Aceh .Pada tanggal 19 November 1949, pejabat dari Sumatera Utara mengunjungi Gunungsitoli untuk membentuk dewan pemerintahan daerah (*Dewan Pemerintah Daerah*) di Nias, yang dilaksanakan pada tahun 1950.

Angkatan Laut AS bersama TNI di Bandara Binaka pasca gempa Nias tahun 2005 Pada tahun 1975, Nias mengalami booming pariwisata, terutama wisatawan Australia, dan menjadi tujuan para peselancar. Peningkatan jumlah wisatawan ini diikuti dengan perbaikan infrastruktur secara umum di Gunungsitoli serta pembangunan pasar dan jalan. Meskipun ada kemajuan, ledakan ini tidak berlangsung lama.

Badan Pusat Statistik BPS Kota Gunungsitoli bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kota Gunungsitoli melaksanakan pendataan lengkap UMKM di Pasar Beringin eks Terminal Gunungsitoli.Hadir pada saat pelaksanaan pendampingan Kepala Bidang Perdagangan bersama dengan staf. "Benar sudah dilakukan pendataan

disana. Dan dari data yang kami miliki ada 218 UMKM di lokasi pasar tersebut. Data yang sama juga sesuai dengan yang dirilis oleh pihak BPS," ujar Kepala Bidang Perdagangan Andy Sofyan Laia SH MH, Jumat (27/10/2023). Sementara itu, Koordinator Statistik Kecamatan Gunungsitoli Herman Zebua, SE bersama dengan Mitra BPS mengatakan, pengumpulan data UMKM ini meliputi yang omsetnya 5 M ke bawah dan untuk mengetahui jenis-jenis kegiatan pedagang di pasar. "Pastinya kita mendukung bahwa pendataan lengkap UMKM kepada para pedagang pasar yang ada di Pasar Beringin eks Terminal ini sebagai upaya mendorong terciptanya basis data UMKM di Kota Gunungsitoli,"

4.2.2 Deskripsi Identitas Informan

Pasar Beringin salah satu jalan yang ramai oleh adanya pedagang kaki lima. Sepanjang jalan pasar beringin banyak pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya. Ruas jalan yang sempit namun ramai ini biasa di lalui oleh kendaraan seperti sepeda motor, mobil pribadi, mobil pengangkut barang bahkan truk tronton menjadikan jalan ini terkesan tidak teratur dan kurang tertib. Letak area parkir yang berada di jalan dan jumlah pengunjung yang relatif banyak mengganggu kelancaran penggunaan jalan dan laju kendaraan yang berlalu lalang.

Letak : Di Pasar Beringin Kota Gunungsitoli

Waktu Berjualan : Pukul 10.00 WIB Sampai dengan 19:30 WIB

Lokasi Berjualan : Trotoar Pasar Beringin.

Gambar 1: Gambar penjual sayur di pasar beringin





Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di pasar beringin Sangat Beragam – macam. Rata – rata adalah barang – barang milik mereka sendiri.

Tabel 1.2

Jenis Barang yang di jual pedagang kaki lima di pasar beringin.

No	Jenis Barang Dagangan	Lokasi
1	Sayur – sayuran	Pasar Beringin
2	Ikan	Pasar Beringin
3	Tahu/tempe	Pasar Beringin
4	Makanan/ minuman	Pasar Beringin
5	Martaba Telur	Pasar Beringin
6	Alat – alat dapur	Pasar Beringin
7	Cabe/ Bawang	Pasar Beringin
8	Buah – buahan	Pasar Beringin
9	Ubi	Pasar Beringin

¹ Saranan yang digunakan pedagang kaki lima di pasar beringin antara lain sebagai berikut.

Tabel 1.3

Saranan yang digunakan pedagang kaki lima di pasar beringin

No	Saranan Berjualan
1	Papan
2	Plastik
3	Trapal
4	Meja dan kursi
6	Mobil

¹ Gambar 2: Pedagang kaki lima di pasar beringin



Pedagang Kaki Lima yang berjualan perlengkapan rumah tangga seperti pada gambar diatas menggunakan tempat Ember Plastik sebagai tempat untuk menaruh barang – barang yang akan di jual. Ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pengunjung yang datang ketempat tersebut. Menggunakan mobil tempat berjualan sayuran Sedangkan penjualan makanan biasanya menggunakan gerobak yang dilengkapi dengan kursi panjang. Gerobak berfungsi sebagai alat yang di gunakan untuk meletakkan makanan yang akan di jual sedangkan kursi disediakan untuk pembeli.

¹ Pedagang kaki lima di pasar beringin sadar betul bahwa lokasi yang mereka tempati untuk berjualan adalah kawasan terlarang bagi pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima tidak mempunyai pilihan lain

meskipun mereka sering ditertibkan, mereka akan tetap bertahan berjualan di pasar beringin. Pedagang kaki lima di pasar beringin sudah mendapatkan tempat relokasi di pasar pagi, namun masih banyak pedagang kaki lima yang kembali berjualan di tempat semula yaitu di trotoar jalan. Hal ini mereka lakukan karena mereka hanya mempunyai satu tempat berjualan di trotoar pasar beringin dan tidak mempunyai tempat lain sebagai tempat untuk berjualan. Alasan pedagang kaki lima memilih tempat ini untuk berjualan adalah tempat ini ramai oleh pengunjung.

Pedagang kaki lima di pasar beringin Mengaku pasrah jika suatu ketika tempat mereka berjualan akan ada penertiban maupun pengusuran. Pada dasarnya para pedagang kaki lima di pasar beringin merasa sebagai pihak yang lemah sehingga walaupun harus melawan mereka pikir sia – sia saja, sehingga mereka lebih memilih bersikap pasrah saja kalau memang mereka harus di tertibkan. Seperti yang diungkapkan oleh pedagang Ibu Putra (PKL Pasar beringin) sebagai berikut.

² Pedagang Kaki lima menjadi pilihan bagi para pendatang sehingga sektor ini mampu menyerap dan memberikan lapangan pekerjaan di tengah persaingan ekonomi perkotaan. Ditinjau dari modal usaha yang dimiliki, pedagang kaki lima yang satu sisi dipandang sebelah mata akan tetapi mereka mampu dan mempunyai jiwa wirausaha dan tingkat kemandirian yang tinggi. Petugas satol PP sebagai pengontrol dari kebijakan tersebut yang langsung turun ke lapangan dan berhadapan langsung dengan para pedagang kaki lima akhirnya harus selalu siap siaga dan tidak jarang menghadapi berbagai reaksi dari para pedagang kaki lima.

Upaya Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menata keberadaan pedagang kaki lima memang selalu mengundang reaksi dari para pedagang kaki lima yang akan di tertibkan. Bagi pedagang kaki lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru.

Dalam menghadapi pedagang kaki lima dan kebijakan tersebut tertua dalam perda dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut.

Pemerintah Kota Gunungsitoli Menggelar Konferensi Pers dalam Rangka Menyampaikan Program Pemerintah Kota Gunungsitoli, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum, dan juga tentang hal yang terjadi atau yang lagi Viral dimedia sosial antara Pedagang Kaki Lima dan satuan Polisi Pamong Praja Kota Gunungsitoli. Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua Mengatakan “mengenai insiden yang terjadi di Pasar Beringin itu adalah situasional, dimana petugas Lapangan juga mempunyai. Dan setelah saya melihat Video yang sebenarnya atau seutuhnya maka disana terlihat jelas bahwa awalnya petugas telah menempuh jalur persuasif, namun oknum pedagang tersebut melawan dan memegang leher petugas, mencaci maki bahkan mengeluarkan kata – kata pengancaman kepada petugas. Dan bukti video seutuhnya itu sudah kita sarahkan kepada pihak penyidik” seterusnya “ tidak ada pemecatan, bahkan saya sudah melaporkan kepada pihak berwajib atas penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh oknum pedagang tersebut. Walikota juga mendukung sepenuhnya petugas di lapangan untuk penegakkan perda demi ketertiban umum.

Masih ditemukan beberapa Pedagang Kaki Lima di pasar beringin Kota Gunungsitoli yang menggunakan trotoar, bahu jalan dan fasilitas umum, sehingga beralih fungsi menjadi kepentingan Ekonomi Yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas, pejalan kaki, dan kebersihan Lingkungan. Satpol PP Kota Gunungsitoli secara terus menerus melaksanakan penertiban pedagang kaki lima tersebut, dengan mengedepankan sisi kemanusiaan melalui pendekatan secara persuasif dan edukatif. Disampaikan Kabid Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Gunungsitoli Emilia Gulo, SE, bahwa petugas tidak serta merta melaksanakan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang melanggar, sudah berulang kali melaksanakan pengawasan, sosialisasi baik secara lisan maupun tulis kepada para

pelaku pedagang kaki lima untuk tidak menggunakan fasilitas umum diwilayah Kota Gunungsitoli, namun saja tidak diindahkan.

Ratusan Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin yang digusur melakukan demonstrasi di depan Kantor Walikota Gunungsitoli. Mereka menyampaikan agar Lakhomizaro Zebua berikan Solusi terhadap pedagang Pasar Beringin yang telah digusur. Kami yang bergabung pada “Aliansi Pedagang Kaki Lima Bersatu” dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Mengecam pembubaran PKL dikawasan Pasar Beringin secara represif dan tidak manusiawi.
2. Hentikan perlakuan represif dan tidak manusiawi kepada warga sebagai solusi prioritas mengatasi masalah ketertiban umum.
3. Menolak Tempat relokasi yang jauh tidak strategis dan tidak bisa menampung seluruh para pedagang yang ada
4. Kalau untuk menata kota, kami tidak keberatan asalkan, Pemerintah mampu menyediakan tempat yang strategis untuk kami para Pedagang Kaki Lima
5. Meminta kepada Bapak Walikota Gunungsitoli untuk menampung dan memfasilitasi tempat yang layak untuk kami para pedagang Kaki Lima, karena hal itu merupakan bentuk pembinaan dalam membantu Ekonomi Rakyat.
6. Meminta Kepada Bapak Walikota Gunugsitoli, untuk meninjau ulang kebijakan pemerintahan dan melihat kesiapan tempat baru serta kelayakan untuk berdagang.
7. Mendesak Walikota Gunungsitoli, untuk segera mencopot Kadis Perindag, karena tidak mampu memberi solusi.
8. Meminta Walikota Gunungsitoli, untuk mencopot Kasatpol PP Kota Gunungsitoli karena terkesan arogan tidak manusiawi saat menertibkan kami para Pedagang Kaki Lima.
9. Jika Tuntutan kami ini tidak diindahkan dalam 3x24 Jam, maka kami akan kembali melaksanakan aksi dengan masa yang lebih besar.

Kegigihan Pedagang Kaki Lima mempertahankan tempat berjualan dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah di gusur atau ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang akan di perolehnya di tempat tersebut. Terdapat tempat – tempat tertentu yang menurut penilaian pedagang kaki lima paling dapat membrikan pendapatan yang tinggi bagi para pedagang kaki lima. Tindakan yang di lakukan oleh petugas satpol PP sebagai instansi penegak perda sesuai prosedur maka satpol PP akan bertindak tegas melalui upaya penertiban yang dilakukan secara terus – menerus (bersama kelurahan, Dinas atau Instansi terkait baik itu Dinas Pasar, Maupun POLRI).

Dalam penertiban Pedagang Kaki Lima akan diberi waktu untuk pindah atau membongkar secara mandiri (dengan jaminan surat pernyataan), apabila masih dilanggar maka pedagang kaki lima yang bersangkutan akan di beri sanksi pidana atau pemberkasan dengan ancaman hukuman kurang paling lama 6 bulan atau denda paling banyak rp. 5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) sesuai dengan perda No. 11 Tahun 2000 pasal 12 tentang pengaturan dan pembina Pedagang kaki lima.

Setelah penertiban, diadakan patroli atau pengawasan yang dilakukan secara menerus oleh Satpol PP dan pihak terkait baik dari kelurahan, Dinas pasar, maupun POLRI. Petugas dalam melakukan penertiban juga seringkali mengalami berbagai kesulitan antar lain yaitu:

1. Para Pedagang Kaki Lima Kembali berjualan setelah petugas pergi.)
 2. Adanya penolakkan Pedagang Kaki Lima tidak mau ditata di tempat yang baru yang telah disediakan oleh pemerintah penataan ditentukan oleh dinas pasar,
 3. Tidak jarang ada pedagang Kaki Lima Menangis minta dikasihani karena mata pencahariannya hanya berjualan.
1. Menolak Relokasi

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk menata keberadaan Pedagang Kaki Lima adalah dengan melakukan relokasi. Relokasi dalam Pedagang Kaki Lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Relokasi merupakan upaya pemerintah untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima. Relokasi tersebut ternyata tidak sepenuhnya mendapat tanggapan yang positif dari para Pedagang Kaki Lima. Karena tidak semua Pedagang Kaki Lima yang bersedia untuk menempati area relokasi tersebut. Hal ini terlihat masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di daerah larangan Pedagang Kaki Lima dan nekad berhadapan langsung dengan para petugas yang menertibkan mereka. Alasan menolak relokasi karena relokasi yang dilakukan oleh pemerintah cenderung cenderung kurang menguntungkan bagi pedagang kaki lima. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu selvi PKL di pasar beringin.

Penelitian di temukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru di anggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para pedagang kaki lima tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apa bila pedagang kaki lima di pindah di lokasi baru besar kemungkinan pedagang kaki lima kehilangan pelanggannya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima melakukan penolakan bila dipindahkan ke lokasi yang baru.

2. Faktor Penyebab perlawanan

Keberadaan pedagang kaki lima seakan – akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut.

Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas

ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, pedagang kaki lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang kaki lima Legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan pedagang kaki lima binaan pemerintah.
2. Pedagang kaki lima Ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki usaha.

Pedagang kaki lima yang bersifat legal biasanya menempati Lokasi yang di tentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang di gunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan pedagang kaki lima Ilegal. Pedagang kaki lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak di tentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal. Pedagang kaki lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Lokasi Pedagang Kaki Lima legal yang telah di tentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Pedagang Kaki Lima dalam penelitian di pasar beringin termasuk pedagang kaki lima ilegal karena mereka menempati daerah larangan pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari pedagang kaki lima.

Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang – barang dagangan. Apabila pedagang kaki lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima, penertiban dilakukan agar pedagang kaki lima tidak melampaui batas- batas yang telah di tentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi

pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan perda pedagang kaki lima di tertibkan dengan cara di pindahkan ke tempat yang telah di tentukan.

Pemerintah Kota Gunungsitoli telah mengeluarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 Tentang pengaturan dan pembinaan mengakui keberadaan pedagang kaki lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku pedagang kaki lima itu sendiri.

Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Dimana ada keramaian, maka disitu pedagang kaki lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di pasar beirngin banyak sekali pedagang kaki lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban sering dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemuarawatan yang diebakkan oleh para pedagang kaki lima. Teguran dan sosialisasi dari petugs dilakukan petugas secara terus menerus. Pedagang kaki lima bukannya berkurang malah semakin bertambah.

Hal – hal yang menjadikan alasan pedagang kaki lima melakukan resistensi adalah faktor ketidak adilan. Pedagang kaki lima merasa telah memberikan pungutan yang di tarik oleh pihak yang telah diberikan kewewngan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk diseter kelurahan setempat. Oleh karena itu pedagang kaki lima tetap berjualan seperti biasanya dan tidak mau pindah dengan alasan mereka telah membayar sejumlah uang. Berdasarkan wawancara penulis dengan ibu Lina Fito Tafonao (PKL Pasar Beringin).

“ Saya membayar setiap hari sebesar Rp. 1000,00 sebagai biaya karcis”

Hal Serupa juga diungkapkan oleh ibu Heni Gea (PKL Pasar Beringin).

“ Saya membayar karcis sebesar Rp 3.500,00 setiap 1 minggu sebagai biaya Administrasi”

¹ Ada juga pedagang kaki lima yang mengaku bahwa mereka berjualan ditempat tersebut dengan Cuma-Cuma/gratis

¹ “Selama saya berjualan di sini saya tidak pernah membayar biaya apapun Hal ini juga di ungkapkan oleh ibu wati Telaumbanua (PKL Pasar Beringin).

¹ “saya tidak pernah membayar selama saya berjualan di tempat ini” Hal ini juga di ungkapkan Ibu Putra Lase

¹ Selanjutnya penelitian ditemukan bahwa penolakan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima wajar dilakukan karena bila lokasi yang baru dianggap tidak menguntungkan. Apabila lokasi yang baru tidak strategis seperti lokasi sebelumnya, maka besar kemungkinan lokasi baru yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima akan sepi pengunjung dan tentu saja bila sepi pengunjung para pedagang kaki lima tidak mendapatkan penghasilan yang memadai. Selain itu, apa bila pedagang kaki lima dipindah di lokasi yang baru besar kemungkinan pedagang kaki lima kehilangan pelangganya. Oleh karena itu, pedagang kaki lima melakukan penolakan bila dipindahkan ke lokasi yang baru.

Informan peneliti ini terdiri dari 5 orang informan, informan yaitu Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gunungsitoli.

¹² Penelitian melakukan Wawancara Mendalam yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan. Keseluruhan informasi tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling karena teknik ini mencakup orang - orang yang seleksi atas dasar kriteria – kriteria yang dibuat peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah peneliti tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh peneliti, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan penelitian ini.

Adapun Jadwal wawancara Informan Kunci dan Informan Pendukung Pada Tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Jabatan	Tanggal	Tempat Wawancara
I.Putra Lase	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Wati Telaumbanua	Pedagang	1 Noveber	Pasar Beringin
Heni Gea	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
Lina Laia	Pedagang	1 November	Pasar Beringin
I.Fito Tafonao	Pedagang	1 November	Pasar Beringin

Sumber : peneliti 2023

4.3 Hasil Penelitian

Data yang disajikan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah data hasil observasi dan data hasil wawancara serta dokumentasi menggunakan teknik Pengumpulan Data. Sebagai Informan Kunci dalam penelitian ini Adalah Pedagang Kakilima Pasar Beringin Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Observasi dan wawancara pada penelitian dilaksanakan berdasarkan surat rekomendasi dari pedagang Kaki Lima Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Sejak tanggal 2 November 2023- selesai.

4.3.1 Analisis Hasil Wawancara

Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Yang dilakukan dengan teknik Pengumpulan Data.

Bedasarkan Tujuan Penelitian wawancara dilakukan peneliti pada tempat penelitian secara langsung dengan menjumpai Informan kunci dan Informan Pendukung yaitu Pihak yang Mengetahui tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunugsitoli, Informasi tersebut untuk menggali data internal dan eksternal, sehingga memperoleh data yang akurat dari hasil wawancara yang mendalam (in-depth interview) yang telah dilakukan peneliti pada ibu . putra sebagai Pedagang Kaki Lima Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota

Gunungsitoli Pada Tanggal 3 November 2023 tentang Analisis Resistensi Pedagang Kakilima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli. Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dilapangan Beliau mengungkapkan Bahwa:

Berikut Hasil Wawancara dengan beberapa informan, Peneliti mencoba menanyakan beberapa hal terkait tentang Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Sesuai Draf Wawancara yang sudah tersedia, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Saudara Mersa Kebijakan Pemerintah tersebut Adil dan Menguntungkan Bagi Usaha Saudara? Jika Tidak Mengapa Saudara Merasa Bertahan Berjualan Pada Tempat ini?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Putra Lase Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Kebijakan Pemerintah Tidak Adil dan Tidak Menguntungkan Usaha kami, kami bertahan di Pasar Beringin ini, Bahwa saya tau betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun seringkali saya dan teman – teman Pedagang Kaki Lima lain di tertibkan oleh petugas namun, bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu – satunya Pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai Pedagang Kaki Lima. Mau tidak mau, setelah ada penertban, saya pasti kembali berjualan di sini seperti biasanya karena ini satu – satunya cara saya mencari nafkah untuk menghadapi keluarga saya.”

2. Bagaimana bentuk- bentuk penolakan Pedagang kaki lima di pasar Beringin terhadap kebijakan pemerintah kota gungungsitoli?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Putra Lase Telaumbanua Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Bentuk – Bentuk Penolakan sebagai kami Pedagang Kaki Lima. Kami tetap berjualan bertahan di pasar beringin ini karena saya berjualan disini sudah bertahun – tahun sampai sekarang tetap berjualan

di tempat ini belum pernah pindah berjualan di tempat berjualan lain, saya merasa lumayan penghasilannya”.

3. Apa Faktor penyebab pedagang kaki lima menolak kebijakan Pemerintah?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Wati Telaumbanua Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Kami tetap berjualan tidak mau pindah karena kami telah membayar setiap hari 1000.000 (seribu) sebagai biaya karcis.”

4. Mengapa pedagang kaki lima melakukan Resitensi terhadap kebijakan pemerintah kota gunungsitoli?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Wati Telaumbanua Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Karena sepinya pembeli di tempat yang disediakan oleh pemerintah dan membuat dagangan kami kurang kurang laku dan akhirnya membuat kami nekat untuk kembali berjualan di pasar beringin.”

5. Bagaimana perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan dalam konteks pedagang kaki lima di Pasar Beringin?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Heni Gea Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Ketidak sesuai dengan kebutuhan lokal: jika kebijakan yang dibelakukan tidak sesuai dengan kebutuhan dan karakter pasar lokal, kami sebagai pedagang kaki lima bisa mengkritik kebijakan tersebut. Karena kami merasa bahwa kebijakan tersebut tidak memperhatikan konteks lokal dan budaya pasar beringin.”

6. Mengapa perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan bisa terjadi di kalangan pedagang kaki lima?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Heni Gea Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Karena kami Pedagang Kaki Lima dan masyarakat Lokal merasa bahwa perubahan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga kami tidak puas terhadap kebijakan pemerintah.”

7. Apa saja bentuk perlawanan terbuka yang mungkin dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Lina Laia Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Bentuk Perlawanan terbuka yaitu kami melakukan demonstrasi dipasar beringin aksi ini kami dapat menarik perhatian media dan masyarakat luas terhadap ketidak puasan kami, terhadap kebijakan pemerintah.”

8. Bagaimana pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengatasi atau meredakan resistensi dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan di Pasar Beringin?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. Ibu Lina Laia Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “ Pemerintah Kota Gunugsitoli yaitu partisipasi dan keterlibatan: melibatkan kami sebagai Pedagang Kaki Lima dan proses pengambilan keputusan. pertemuan rutin, forum diskusi, atau dialog terbuka dapat menciptakan saluran komunikasi yang baik antara pemerintah dan pedagang. Dengan mendengarkan masukan dan kekhawatiran kami, Pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan kami.”

9. Bagaimana dampak dari perlawanan terbuka terhadap perubahan dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. I.Fito Tafonao Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “ Dampak perlawanan terbuka : jika Pemerintah merespons perlawanan dengan tindakan represif atau kebijakan yang melakukan, citra pemerintah dapat berpengaruh negatif. Tindakan keras pemerintah terhadap pedagang dapat memicu kritik dan merugikan citra negara.”

10. Apa strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pedagang kaki lima dan mengurangi tingkat resistensi terhadap kebijakan perubahan di Pasar Beringin?

Berdasarkan Hasil wawancara Kepada. I.Fito Tafonao Pedagang Kaki Lima Pasar Beringin Kota Gungsitoli

Menyatakan:

Bahwa “Strategis yang diadopsi oleh pemerintah mengadakan dialog terbuka dan transparan dengan kami pedagang kaki lima. Dengan mendengarkan ide - ide, Aspirasi mereka, pemerintah dapat memahami perspektif mereka dan merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan kami.

4.3 Pembahasan

4.4.1 Indikator Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima

1. Menurut (Ford & Ford, 2009: 26009) Tindakan Formal Pemerintah: Mengukur jumlah dan jenis tindakan resmi yang diambil oleh pemerintah, seperti pengesahan undang-undang, peraturan, keputusan eksekutif, atau kebijakan lain yang terdokumentasi secara formal tersebut menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Tindakan formal pemerintah memiliki dampak signifikan pada masyarakat, oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus diarahkan untuk memecahkan masalah dan mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan Teori Menurut Dawson, P. (2003) menyatakan bahwa indikator resistensi adalah “Perlawanan Terbuka atau Kritik Terhadap Perubahan: Individu atau kelompok yang secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan atau kritik terhadap perubahan, baik melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung” artinya Perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan adalah ketika individu atau kelompok dengan jelas menyatakan ketidaksetujuan atau memberikan kritik terhadap perubahan yang sedang

berlangsung dalam organisasi. Hal ini dapat terjadi melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung antara mereka dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan.

Selanjutnya Berdasarkan wawancara Dengan ibu Putra, tindakan formal pemerintah tidak hanya merupakan proses administratif, tetapi juga memiliki dampak langsung pada kelangsungan hidup usaha kami dan penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa tindakan formal tersebut mencerminkan kebutuhan dan kepentingan kami sebagai anggota masyarakat yang berusaha mencari nafkah melalui usaha dagang Kami.

Selanjutnya Ketika diterapkan pada konteks pedagang kaki lima, ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi terhadap perubahan kebijakan pemerintah, seperti regulasi baru atau kebijakan yang mempengaruhi bisnis mereka. Mereka dapat melakukan perlawanan terbuka dengan menyatakan ketidaksetujuan mereka melalui pertemuan, diskusi, atau komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, resistensi pedagang kaki lima mencerminkan reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Selain itu Ibu Heni Gea juga Menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah merugikan bisnis Kami, kami melakukan bentuk perlawanan terbuka atau memberikan kritik terhadap kebijakan tersebut. Secara keseluruhan, Indikator bahwa pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai tindakan formal mereka kepada kami. Transparansi memungkinkan kami memahami aturan dan kebijakan yang berlaku, menciptakan kepercayaan publik, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak terjadi secara tersembunyi.

2. Menurut (Oreg, Vakola, dan Armenakis, 2011 : 69) penolakan terhadap kebijakan pemerintah : Tingkat penolakan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil bagi mereka. Penolakan terhadap kebijakan pemerintah adalah sikap atau tindakan dari pedang kaki lima dalam menolak kebijakan pemerintah

yang mereka anggap merugikan dan tidak adil bagi kepentingan mereka.

Ketika pedagang kaki lima merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi mereka, atau bahkan berdampak negatif pada usaha dan pendapatan mereka, maka mereka cenderung menolak dan membantah kebijakan tersebut. Menyoroti pentingnya pandangan dan persepsi pedagang kaki lima tentang kebijakan pemerintah. Penolakan terhadap kebijakan dapat mencerminkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan dari kelompok pedagang kaki lima terhadap kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau adil bagi mereka. Hal ini dapat menjadi isyarat bagi pemerintah untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kaki lima dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Pengakuan dan pengertian terhadap pandangan dan keluhan mereka dapat membantu menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan berbagai perspektif dari pihak yang terdampak. menunjukkan bahwa partisipasi dan komunikasi yang lebih aktif antara pemerintah dan kelompok pedagang kaki lima dapat membuka peluang untuk mencari solusi bersama yang lebih baik dan lebih adil. Pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, termasuk pedagang kaki lima, akan membantu mencapai kesepakatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Persepsi adil atau tidaknya kebijakan pemerintah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti transparansi dalam proses pembuatan kebijakan, keterlibatan pedagang kaki lima dalam pengambilan keputusan, perlakuan yang adil dari pemerintah, dan dampak kebijakan tersebut pada kondisi kehidupan pedagang kaki lima.

Berdasarkan teori di sampaikan Menurut Paraahli Anwar Prabu Mangkunegara (2009:93) Indikator, Penolakan ini mencerminkan ketidaksetujuan dan ketidakpuasan pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan dan tidak adil. Pedagang kaki lima mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut membahayakan usaha mereka, mengurangi pendapatan, atau menciptakan hambatan-hambatan bagi kelangsungan bisnis mereka. Dalam menolak kebijakan tersebut, pedagang

kaki lima dapat mengambil berbagai tindakan, seperti mengorganisir protes, mogok, menolak mentaati regulasi yang diterapkan, atau bahkan mengajukan petisi atau kampanye untuk mencabut atau mengubah kebijakan tersebut.

Penolakan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bentuk resistensi yang bisa mencakup berbagai strategi, dari tindakan perorangan hingga upaya kolaboratif bersama komunitas atau organisasi yang memiliki kepentingan serupa. Tujuan dari penolakan ini adalah untuk melindungi kepentingan pedagang kaki lima dan memperjuangkan kebijakan yang lebih mendukung pertumbuhan bisnis mereka serta keadilan dalam lingkungan usaha.

Berdasarkan Hasil Penelitian Wawancara dengan Ibu Heni Gea bahwa kebijakan Pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok mereka secara khusus, mereka dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami.

Berdasarkan wawancara Menurut Ibu fito Tafonao Kami sering menghadapi masalah hukum terkait dengan tempat berjualan kami. Kebijakan pengusuran atau pembatasan lokasi berjualan dapat menimbulkan penolakan karena hal ini dapat mengancam kelangsungan hidup bisnis kami.

Selanjutnya, Pedagang kaki lima merupakan bagian integral dari ekonomi informal, memberikan pekerjaan dan penghidupan bagi banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan layanan kepada masyarakat, dan berkontribusi pada perekonomian lokal. Pedagang kaki lima menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi, ketidakadilan dalam kebijakan pemerintah, serta ancaman pengusuran dan tantangan hukum. Kebijakan pemerintah yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan pandangan mereka dapat menyulitkan kelangsungan hidup bisnis mereka. Pedagang kaki lima bukan hanya pelaku ekonomi, tetapi juga anggota masyarakat yang aktif

secara sosial dan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam mempertahankan tradisi lokal dan membangun jaringan sosial dalam komunitas mereka. Penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami kebutuhan pedagang kaki lima dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Memberikan dukungan, pelatihan, akses ke pasar, dan memperhitungkan kebijakan yang adil bagi pedagang kaki lima dapat membantu meningkatkan kondisi hidup mereka. Studi lanjutan tentang pedagang kaki lima dan interaksi mereka dengan kebijakan pemerintah diperlukan untuk memahami dinamika ekonomi informal secara lebih mendalam. Penelitian ini dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif untuk mendukung pedagang kaki lima dan sektor ekonomi informal lainnya. Berdasarkan wawancara Menurut Ibu Lina Laia kami merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak memberikan perlakuan adil atau merugikan kelompok kami secara khusus, kami dapat menolak kebijakan tersebut sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan yang kami alami.

Dengan demikian, hasil penelitian oleh peneliti di lapangan Resistensi pedagang kaki lima di pasar beringin

Berdasarkan Hasil observasi di lapangan dengan wawancara Ibu Putra Lase Kami sering kali menyampaikan ketidaksetujuan kami melalui protes dan demonstrasi. Kami dapat berkumpul di tempat-tempat umum, mengadakan unjuk rasa, atau mogok berjualan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang Kami anggap merugikan. Pedagang kaki lima dapat menunjukkan resistensi dengan tidak mematuhi kebijakan-kebijakan tertentu. Misalnya, mereka mungkin terus berjualan di lokasi-lokasi yang telah dilarang oleh pemerintah, mengabaikan pembatasan jam operasional, atau tidak membayar pajak yang diberlakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di pasar beringin Kota Gunungsitoli maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

Analisis Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Gunungsitoli Di pasar Beringin memiliki komponen Kunci. Faktor yang melatar belakangi perlawanan Pedagang Kaki Lima adalah faktor ketidakadilan. Pedagang Kaki Lima telah membayar sejumlah uang namun, penertiban terus-menerus dilakukan oleh petugas. Hal ini yang membuat Pedagang Kaki Lima merasa diperlakukan tidak adil, Pedagang Kaki Lima beranggapan bahwa mereka mempunyai hak untuk tetap berjualan di tempat semula karena mereka telah membayar sejumlah uang. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut: satu, tetap berjualan dua, menolak relokasi tiga, menyembunyikan barang dagangan, dan empat, bersembunyi (kucing-kucingan) dengan petugas. Mengenai kelembagaan Pedagang Kaki Lima di dua tempat yang diteliti tidak mempunyai paguyuban resmi, namun ada pihak yang mengkoordinir para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan aktivitasnya ditempat tersebut.

5.2 Saran

Bagi pemerintah adalah pemerintah harus tegas dan adil terhadap Pedagang Kaki Lima. Bagi Pedagang Kaki Lima harus disiplin, menjaga kebersihan dengan baik dan mendirikan paguyuban yang resmi. Dengan adanya paguyuban yang resmi, akan mempermudah baik bagi pemerintah maupun Pedagang Kaki Lima dalam menjembatani antara keinginan pemerintah dengan kemauan Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction*. Houghton Mifflin Company.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Jakarta: Balai pusat
- Dunn, W. N. (2014). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice-Hall, Inc.
- Dawson, P. (2003). *Understanding Organizational Change: The Contemporary Experience of People at Work*. Sage Publications.
- Damsar, 2002, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik* Yogyakarta: Gava Media.
- Ford, J. D., & Ford, L. W. (2009). Kritik Terhadap Perubahan: Mengidentifikasi dan Mengatasi Resistensi dalam Organisasi. *Journal of Applied Behavioral Sci*(Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2009). Ketidapatuhan atau Ketidakaktifan: Indikator Resistensi terhadap Perubahan. Dalam Dunford, R., Palmer, I., & Benveniste, J. (Eds.), *Resistance and Change in the Corporate America* (hal. 123-135). New York: Routledge
- Handoyo, E. 2012 *Eksistensi pedagang kakilima (studi tentang kontribusi Modal Sosial terhadap resistensi PKL disemarang)*. Saltiga: universitas kristen satya wacana.
- Hierchheim, R dan Newman, M. 1998. *Information System and User Resistance: Theory and Practice*. *Computer Journal*. Pp. 398-408
- Herdinsyah, Haris, 2011. *Metodologi Penelitian kualitatif untk ilmu- ilmu sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasibuan, H. M (019). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Bumi aksara
- Jurnal "Employee Resistance and Change Implementation" oleh Cynthia S. Arbaugh dan Gary W. Selnow (2005).
- Lumbantoruan, dkk. M., Tewel, B., Lumintang, G. 2021 *Faktor – faktor yang Menyebabkan resistensi terhadap perubahan organisasi di pasar*

(persero Integrated Terminal bintang. EMBA: Jurnal riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi, vol 9(1): hal- 914-923.

McGee dan Yeung, 2014, Teori Administrasi pblk. Bandung: Alfabeta..

Moleong, L. L., 2003. Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya

Mentari, S, Y., Syahar. F 2018. Partisipasi pedagang kaki lima dalam pengelolaan Sampah Pasar Bawah Kota Bukit Tinggi, Jurnal Buana, Vol 2(5): hal 328 – 337.

Mufidah, A. (2020). Polemik polemik kebijakan pemerintah Hukum dan keadilan, 4(1), 159 – 166.

Narasumber: Buku "The Story of Resistance to Change in Organizations: A Situated Rhetorical Analysis" oleh David M. Boje (2001).

Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2009). Ketidapatuhan atau Ketidakaktifan: Indikator Resistensi terhadap Perubahan. Dalam Dunford, R., Palmer, I., & Benveniste, J

Novita dalam Muslim Resistensi pedagang kaki lima di jalan colombo, yogyakarta:Tesis

Nazir.Mohamad , ph.d. (2011). Metode peneliian. Jakarta : Ghalia Indonesia

Nawawi. "Metode penelitian kualitatif," 45. Yogyakarta: Gadjaj Mada University Press, 2006.

Oreg, S., Vakola, M., & Armenakis, A. (2011). Penolakan Terhadap Informasi sebagai Indikator Resistensi terhadap Perubahan Organisasi. European Journal of Work and Organizational Psychology, 20(1), 15

Sugiono. (2019). Metoe Penelitian Kuantitatif Dan kualitatif Dan R dan D. bandung: ALFABETA

Syugiyono. (2016). Metodologi, penelitian kualitatif. Bandung:Alfabeta.

Sanusi. 2014 . metode penelitian Bisnis. Jakarta : Salemba Empat.

Tampubolon, R. (2012). Manajemen Perubahan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

5
Umar, H. 2010. Desai peneliti MSDM dan perilaku Karyawan :
paradigm

Positivistik dan Berbasis pemecahan masalah. Jakarta : Rajawali Pers.

Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (2017). Theories of the Policy Process (4th ed.).
Westview Pres.

DRAFT WAWANCARA

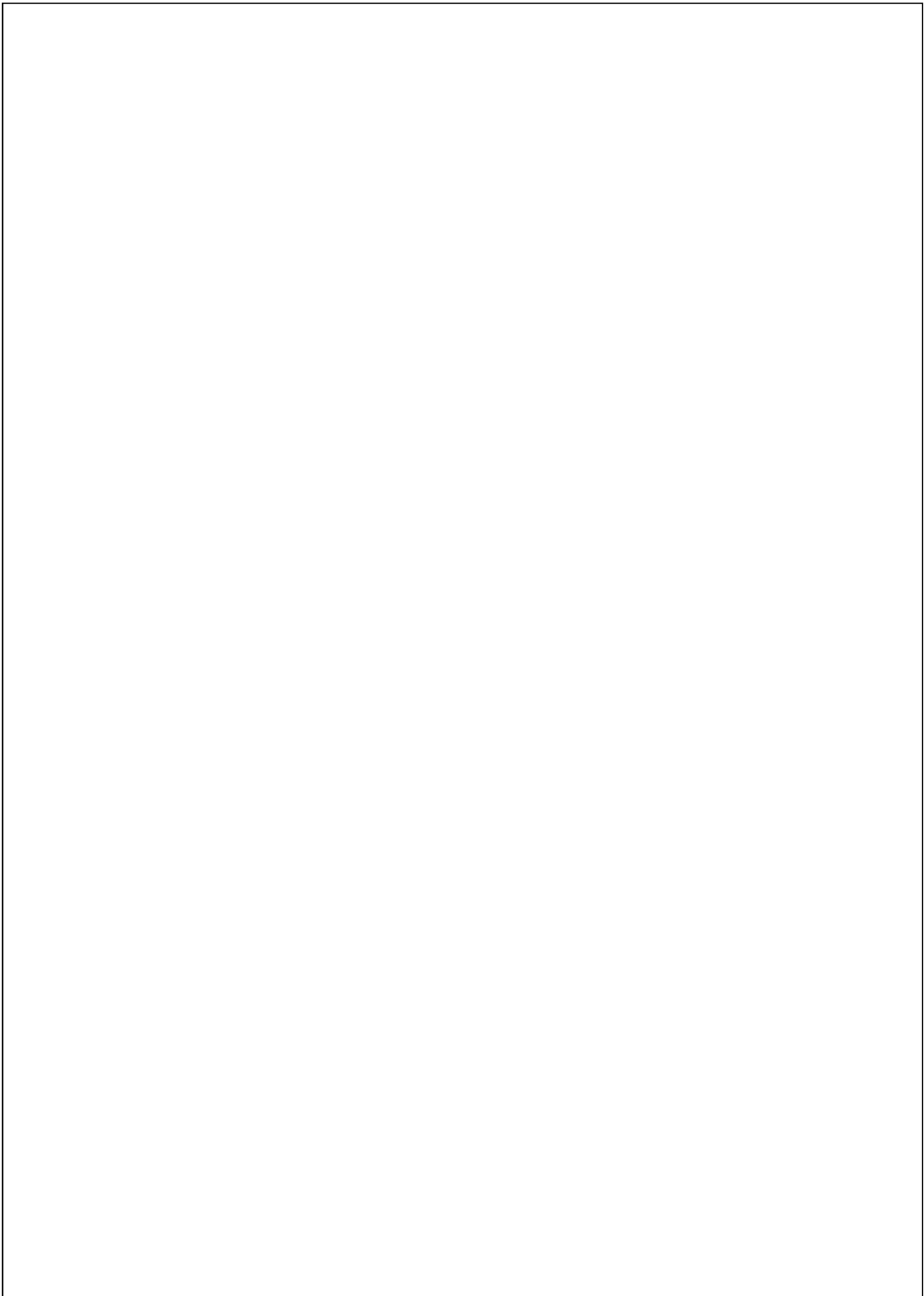
1. Apakah Saudara merasa kebijakan pemerintah tersebut adil dan menguntungkan bagi usaha Saudara? Jika tidak, mengapa Saudara merasa Bertahan berjualan Pada tempat ini?
2. Bagaimana bentuk- bentuk penolakan Pedagang kaki lima di pasar Beringin terhadap kebijakan pemerintah kota gungungsitoli?
3. Apa Faktor penyebab pedagang kaki lima menolak kebijakan Pemerintah?
4. Mengapa pedagang kaki lima melakukan Resistensi terhadap kebijakan pemerintah kota gungungsitoli?
5. Bagaimana perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan dalam konteks pedagang kaki lima di Pasar Beringin?
6. Mengapa perlawanan terbuka atau kritik terhadap perubahan bisa terjadi di kalangan pedagang kaki lima?
7. Apa saja bentuk perlawanan terbuka yang mungkin dilakukan oleh pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah Kota Gunungsitoli terkait Pasar Beringin?
8. Bagaimana pemerintah Kota Gunungsitoli dapat mengatasi atau meredakan resistensi dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan di Pasar Beringin?
9. Bagaimana dampak dari perlawanan terbuka terhadap perubahan dapat mempengaruhi citra pemerintah di mata masyarakat?
10. Apa strategi yang dapat diadopsi oleh pemerintah untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pedagang kaki lima dan mengurangi tingkat resistensi terhadap kebijakan perubahan di Pasar Beringin?

DOKUMENTASI

**Wawancara Dengan Kepada Pedagang Kakilima Di
Pasar Beringin Kota Gunungsitoli 28 Oktober 2023**







"ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI STUDI (STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI}"

ORIGINALITY REPORT

37%

SIMILARITY INDEX

37%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	docplayer.info Internet Source	12%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	8%
3	Submitted to umc Student Paper	3%
4	journal.unesa.ac.id Internet Source	3%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
6	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	2%
7	lib.unnes.ac.id Internet Source	1%
8	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1%

9	Internet Source	1 %
10	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
11	www.neliti.com Internet Source	1 %
12	Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur Student Paper	1 %
13	repository.sari-mutiara.ac.id Internet Source	1 %
14	eprints.uny.ac.id Internet Source	1 %
15	repository.uhn.ac.id Internet Source	1 %
16	digilib.ikipgriptk.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

"ANALISIS RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI STUDI (STUDI KASUS PADA PASAR BERINGIN KOTA GUNUNGSITOLI}"

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68
